

**KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN  
SAMPAH  
(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat)**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**HERI SETIAWAN**

**1716021006**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN SAMPAH (Studi di Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Lampung Barat)**

**Oleh :**

**HERI SETIAWAN**

Pengelolaan sampah saat ini sangat membutuhkan perhatian khusus dan serius dari pemerintah dan lembaga terkait. Dinas Lingkungan Hidup adalah dinas terkait yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini di latar belakang oleh kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dan beberapa permasalahan terkait pengelolaan sampah diantaranya : Volume sampah meningkat, kurangnya sarana dan prasarana sampah dan kurangnya kesadaran masyarakat terkait masalah sampah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan konsep kinerja organisasi publik oleh Dwiyanto, dimana terdapat empat variabel dari kinerja organisasi publik, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas dan akuntabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator : (1) Produktivitas belum dikatakan maksimal, karena target capaian pengurangan dan penanganan sampah belum mampu terpenuhi sesuai dengan ketentuan JAKSTRADA. (2) Kualitas Layanan DLH yang diberikan kepada masyarakat belum secara merata dan maksimal, layanan hanya berfokus pada pusat kota. (3) Responsivitas belum maksimal, karena program dan pengembangan belum selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. (4) Responsibilitas masih sangat buruk, dilihat dari pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan prinsip administrasi atau kebijakan. (5) Akuntabilitas, DLH bertanggung jawab dengan melaporkan seluruh rangkaian pekerjaan pada akhir tahun dengan menyusun Laporan JAKSTRADA. Dari hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan sampah belum bisa dikatakan baik dan maksimal hal ini dapat di pahami melalui berbagai indikator yang belum terpenuhi.

**Kata kunci: kinerja, Dinas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah**

## **ABSTRACT**

### ***PERFORMANCE OF THE ENVIRONMENTAL AGENCY IN WASTE MANAGEMENT (Study at the Environmental Office in West Lampung Regency)***

**By:**

**HERI SETIAWAN**

*Waste management currently requires special and serious attention from the government and related institutions. The Environmental Service is the related agency responsible for waste management. This research was motivated by the performance of the West Lampung Regency Environmental Service and several problems related to waste management, including The volume of waste increased, the lack of waste facilities and infrastructure, and the lack of public awareness regarding waste problems. The purpose of this study was to determine the performance of the West Lampung Regency Environmental Service in waste management. This study uses the concept of public organization performance by Dwiyanto, where there are four variables of public organization performance, namely productivity, service quality, responsiveness, and accountability. The method used in this research is descriptive qualitative, with data collection techniques namely through interviews, observation, and documentation. The results of the research show that the indicators: (1) Productivity is not maximized, because the target for waste removal and handling has not been able to meet JAKSTRADA requirements. (2) The quality of DLH services provided to the community is not evenly distributed and maximized, services only focus on the city center. (3) Responsiveness is not maximized, because programs and development are not in line with the needs and aspirations of the community. (4) Responsibility is still very bad, as seen from the implementation of activities that are not by the principles of policy or policy. (5) Accountability, DLH is responsible for reporting the entire work series at the end of the year by compiling the JAKSTRADA Report. From the research results that have been obtained, it can be interpreted that in waste management it cannot be said to be good and maximally this can be understood through various indicators that have not been fulfilled.*

**Keywords: performance, Environmental Agency, SustainabilityManagement**

**KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN  
SAMPAH  
(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat)**

Oleh

**HERI SETIAWAN**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **KINERJA DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP DALAM PENGELOLAAN SAMPAH  
(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten  
Lampung Barat)**

Nama Mahasiswa : **Heri Setiawan**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1716021006**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

**Drs. Sigit Krisbintoro, M.I.P.**

NIP. 196112181989021001

2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

**Drs. Sigit Krisbintoro, M.I.P.**

NIP. 196112181989021001

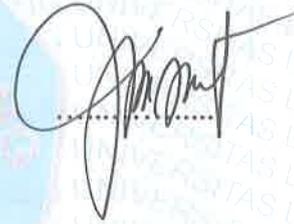
**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Drs. Sigit Krisbintoro, M.I.P**



**Penguji : Darmawan Purba, S.IP.,M.IP**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
**NIP. 196108071987032001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 25 Juli 2023**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 25 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan



Heri Setiawan

NPM. 1716021006

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Heri Setiawan, merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Ridwan dan Ibu Rosdawati. Penulis dilahirkan di Kota Besi, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat, Lampung pada tanggal 16 Desember 1998. Jenjang Pendidikan penulis dimulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Kota Besi dan menyelesaikan pada tahun 2011. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Liwa dan menyelesaikan pada tahun 2014. Pendidikan menengah atas penulis selesaikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Liwa Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan studi di perguruan tinggi dan tercatat sebagai mahasiswa di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Penulis mendapatkan beasiswa BIDIKMISI. Selama kuliah di Universitas Lampung penulis mengikuti beberapa kegiatan, penulis aktif dalam organisasi HMI Komisariat Sosial Politik Unila. Penulis melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung tahun 2020 di Pekon Negeri Ratu, kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat. Penulis juga melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung 2020 di Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Bandar Lampung.

## **MOTTO**

*“Whenever He wills a thing, He just commands it “Be” and it is”*

**(Quran 36:82)**

*“Terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk”*

**(Tan Malaka)**

*“Sekecil apapun kebaikan akan tetap dihitung sebagai kebaikan”*

**(Heri Setiawan)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah segala ikhtiar hamba Mu Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang yang menyayangiku: Kedua orang tua ku Ayahanda Ridwan dan Ibunda Rosdawati yang selalu memberikan dukungan, nasehat yang tiada henti serta senantiasa sabar dalam membimbing setiap langkahku, mendidikku dengan penuh cinta, mendoakan serta melimpahkan segenap kasih sayang dan materi yang tiada terhingga.

Kakek, nenek, adik Nando Dinata serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa, motivasi dan semangat.

Almamater tercinta Universitas Lampung yang akan menjadi kebanggaan selamanya yang telah mendewasakan pola berpikir dan menjadi salah satu tempat dalam menggali ilmu.

## SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat)**”. Sholawat teriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sungguh gerakan revolusioner yang telah tergores dalam sejarah memberikan inspirasi dan teladan yang begitu luar biasa bagi umat manusia dan peradabannya.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dalam penyusunan skripsi ini. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain yaitu:

1. Ibu Dr, Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A, I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
3. Bapak Drs, R Sigit Krisbintoro, M.IP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
4. Bapak Syarief Makhya selaku dosen Pembimbing Akademik peneliti.
5. Bapak Drs, R Sigit Krisbintoro, M.IP selaku pembimbing utama penulis yang telah banyak memberikan kritik, saran, masukan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan sebaik-baiknya.

6. Bapak Darmawan Purba, S.IP, M.IP selaku penguji utama penulis yang telah banyak memberikan kritik, saran, masukan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan sebaik-baiknya.
7. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada bapak/ibu semua. Terimakasih telah memberikan ilmu dan pengalamannya. Terimakasih telah menjadi seseorang yang berpengaruh bagi penulis untuk merengguh ilmu pengetahuan. Semoga semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis akan menjadi amal jariyah bagi seluruh dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan. Aamiin.
8. Terimakasih untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda Ridwan dan Ibunda Rosdawati yang telah menjadi sosok pertama di kehidupan ini dalam mengenalkanku pada tuhan ku Allah SWT dan telah membesarkan, merawat, serta tak hentinya memberikan dukungan dan mendo'akan untuk keberhasilan anaknya. Terimakasih atas kasih sayang yang tidak terhingga dan telah berjuang untuk menjadikan penulis sebagai insan berpendidikan tinggi. Semoga ilmu yang penulis dapatkan dapat bermanfaat bagi banyak orang dan menjadi amal jariyah yang akan selalu mengalir kepada ayahanda dan ibunda tercinta, Aamiin.
9. Adik ku Nando Dinata sudah banyak memberikan kebahagiaan dan cintanya kepada penulis. Semoga kita semua selalu rukun dan saling menyayangi satu sama lain. Aan Juliansa semoga tenang di sisi Allah SWT Amin.
10. Keluarga besar ku tamong, kajjong, alak, unik, pakngah, makngah, pakcik, makcik, mamak, inan, abang , ngah, kakak, adik, sepupu dan semua nakan yang telah membantu memberikan do'a, motivasi dan nasehat untuk menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
11. Lenka Vivia Veronica.
12. Sahabat yang sudah berbagi kebahagiaan dan memberikan pembelajaran pengalaman yang berharga dalam hidup ini,.
13. Sahabat Leader GTA yang selalu memberikan semangat, mengingatkan dan mengajak dalam hal kebaikan serta teman-teman grup Leader GTA yang

selalu memberikan rasa nyaman dan kebahagiaan. semoga kita dapat membahagiakan dan menjadi kebanggaan bagi semua orang yang kita sayangi.

14. Teman terbaikku di perkuliahan. terimakasih atas semua suka duka dan pengalaman yang sangat berkesan dan tidak akan pernah terlupakan, semoga kita akan selalu berhubungan baik dan sukses menggapai impian kita masing-masing.
15. Kepada keluarga besar Khaja Sindikhan terimakasih sudah mendoakan dan telah memberikan supportnya agar saya dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
16. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dan Wartawan Kabupaten Lampung Barat, serta seluruh informan yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu Penulis.
17. Kepada Lazio Toto Azmi S.IP, Putra Erlangga, Ardiansah, Imbang Kurniawan, A.Nur Tri Sutrisno, Alan Aska Nicola, Paskha Lintang, Husna Nabila, Putri, Agung Dwita, Diah, Seli dan yang lainnya terimakasih karena sudah membantu penulis dalam proses menyelesaikan skripsi.
18. Kepada seluruh guru SD, SMP, dan SMA saya terimakasih telah membimbing dan memberikan ilmu yang sangat berharga serta pengalaman dan pelajaran baru dihidup saya sewaktu sekolah.
19. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Sosial Politik Universitas Lampung, Tondano 35 dan seluruh anggota terimakasih sudah berbagi kebahagiaan, pengalaman, dan sudah mengajak dalam hal kebaikan semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama ciptaan Allah.
20. Seluruh keluarga HMI yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
21. Terimakasih untuk semua yang menyayangi dan mendoakan penulis semoga semua hal baik juga akan kembali kepada yang memberi.
22. Kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya;

23. Dan juga terimakasih kepada diri saya sendiri, Heri Setiawan. Sudah bertahan dan berjuang sejauh ini dan tidak pernah menyerah. Setelah ini harus bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang.

Bandar Lampung, 25 Juli 2023

Penulis,

Heri Setiawan

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>

### I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1. Manfaat Praktis .....	11
1.4.2. Manfaat Teoritis .....	11

### II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kinerja .....	12
2.1.1. Pengertian Kinerja.....	12
2.1.2. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja .....	13
2.1.3. Indikator Pengukuran Kinerja .....	14
2.2. Sampah .....	19
2.2.1. Pengetian Sampah .....	19
2.2.2. Jenis-jenis Sampah.....	19
2.2.3. Sumber Sampah.....	20
2.3. Pengelolaan Sampah.....	22
2.4. Kerangka Pikir .....	25

### **III.METODE PENELITIAN**

3.1. Tipe Penelitian .....	29
3.2. Lokasi Penelitian .....	29
3.3. Fokus Penelitian .....	30
3.4. Jenis dan Sumber .....	30
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.6. Teknik Pengolahan Data.....	36
3.7. Teknik Analisis Data .....	38
3.8. Keabsahan Data.....	39
3.9. Informan Penelitian .....	41

### **IV.GAMBARAN UMUM**

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Lampung Barat .....	43
4.1.1 Sejarah Pembentukan Kabupaten Lampung Barat.....	43
4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Lampung Barat .....	44
4.1.3 Kondisi Pemerintahan .....	45
4.1.4 Kondisi Kependudukan .....	46
4.2 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat .....	47
4.2.1 Wilayah Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabuapten Lampung Barat .....	47
4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.....	47
4.2.3 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat .....	48

### **V.HASIL DAN PEMBAHASAN**

5.1 Hasil Penelitian .....	50
5.1.1 Produktivitas .....	50
5.1.2 Kualitas Layanan .....	60
5.1.3 Responsivitas .....	66
5.1.4 Responsibilitas .....	69

5.1.5 Akuntabilitas.....	72
5.2 Pembahasan .....	73
5.2.1. Produktivitas .....	74
5.2.2. Kualitas Layanan .....	75
5.2.3. Responsivitas.....	76
5.2.4. Responsibilitas.....	77
5.2.5. Akuntabilitas .....	79

## **VI. PENUTUP**

6.1 Simpulan.....	81
6.2 Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Lampung Barat, Tahun 2015 .....	4
2. Volume Sampah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 .....	5
3. Penelitian Terdahulu dan Relevan .....	8
4. Daftar Informan .....	36
5. Daftar Informan .....	42
6. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Lampung Barat, Tahun 2014 .....	46
7. Neraca Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021-2022.....	59
8. Laporan Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022.....	60
9. Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.....	62
10. Jumlah TPS Kabupaten Lampung Barat .....	63

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
1. Kerangka Berpikir Penelitian .....	28
2. Teknik Pengumpulan Data. ....	35
3. Peta Kabupaten Lampung Barat .....	44
4. Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Kabupaten Lampung Barat .....	49

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berkembangnya zaman yang berlangsung cukup dinamis menjadikan Indonesia menjadi Negara kepulauan terbesar di dunia tentu tidak dapat berdiam diri tanpa melakukan sebuah perubahan yang mengarah pada pembaharuan. Berbagai perubahan ini dapat menimbulkan beberapa dampak dalam berbagai aspek, termasuk dalam pemerintahan di Indonesia. Hambatan dan tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan zaman yang terjadi harus disikapi baik dan bijak oleh Pemerintah agar mampu bertahan atas berbagai perubahan tersebut. Sistem pemerintahan yang mulanya sentralistik kini sudah berubah menjadi desentralistik.

Pemerintah telah memberikan kewenangan untuk daerah guna mengatur serta mengurus urusan pemerintahannya secara mandiri. Kebijakan ini tercantum pada amanat Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemberian otonomi kepada daerah bertujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan kemandirian daerah. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terbuka kesempatan bagi provinsi dan kabupaten/kota sebagai pelaksana kebijakan sehingga provinsi dan kabupaten/kota bisa meningkatkan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kab/kota pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa : Hubungan antara

urusan susunan pemerintah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, pemerintah daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian. Dalam hal ini Pemerintah Daerah diberikan wewenang mengatur urusannya secara mandiri diluar urusan pemerintah pusat, termasuk masalah lingkungan yang terdapat di daerah yang merupakan urusan wajib non pelayanan dasar.

Masalah lingkungan yang cukup sering terjadi di daerah pada umumnya adalah masalah sampah yang dihasilkan pada sekitar lingkungan atau sampah yang dihasilkan oleh kegiatan sehari hari, hal ini sangat penting agar menjadi perhatian dari pemerintah daerah yang menanganinya, karena masalah sampah dinilai cukup serius. Menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Sampah merupakan sisa dari kegiatan manusia yang tidak dapat digunakan lagi.

Menindaklanjuti Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pengelolaan Sampah maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah sebagai dasar penanganan sampah di Kabupaten Lampung Barat. Dinas berkaitan dengan lingkungan ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab atas kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat harus mampu merespon dan mengatasi segala macam persoalan lingkungan hidup dan kebersihan dengan langkah-langkah yang strategis supaya mampu memenuhi harapan masyarakat luas, yaitu terwujudnya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Lampung Barat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, menyebutkan kegiatan Penanganan Sampah merupakan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

- 1) Pemilahan dilaksanakan ditempat diciptakannya sampah dan dipilah berdasarkan jenisnya.
- 2) Pengumpulan dilaksanakan sejak sampah berada dari lingkungan rumah tangga sampai ke TPS begitu pula saat di TPA dengan tetap sesuai dengan jenisnya.
- 3) Pengangkutan merupakan suatu bentuk kegiatan membawa sampah dari lingkungan rumah tangga atau TPS kemudian dibawa ketempat pengolahan terakhir atau TPA.
- 4) Pengolahan dilaksanakan dengan cara meubah bentuk atau komposisi dari sampah yang dilaksanakan di TPS atau TPA.
- 5) Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan cara mengembalikan sampah ketempat media lingkungan dengan tetap menjaga lingkungan secara aman.

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Lampung Barat, Tahun 2014**

NO	KECAMATAN	PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Balik Bukit	19.256	17.824	37.080
2	Sukau	10.918	9.923	20.841
3	Lumbok Seminung	3.744	2.957	6.701
4	Belalau	6.588	5.724	12.312
5	Sekincau	9.594	8.528	18.122
6	Suoh	9.756	8.249	18.005
7	Batu Brak	6.780	6.162	12.942
8	Pagar Dewa	11.156	8.644	19.800
9	Batu Ketulis	8.165	6.498	14.663
10	Bandar Negeri Suoh	14.107	11.866	26.573
11	Sumber Jaya	12.110	11.330	23.440
12	Way Tenong	16.840	15.904	32.744
13	Gedung Surian	7.863	7.191	15.054
14	Kebun Tebu	10.605	9.628	20.233
15	Air Hitam	6.332	5.546	18.878

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat*

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Lampung Barat yang ada pada 15 Kecamatan sebanyak 302.749 jiwa. Sehingga, jumlah sampah perhari yang dihasilkan Kabupaten Lampung Barat adalah 35.136 ton. Adapun fasilitas pengangkut sampah yang telah dimiliki oleh Kabupaten Lampung Barat terdiri dari 10 unit truk pengangkut sampah dan 28 unit motor roda tiga pengangkut sampah, serta memiliki satu Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yaitu TPA sampah Zona 1 yang berada di Desa Bahway dan 18 Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah yang masing-masing saling terhubung berdasarkan ketetapan jalur pengangkutan sampah (DLH Kab. Lampung Barat, 2021).

**Tabel 2. Volume Sampah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021**

<b>No.</b>	<b>Bulan</b>	<b>VolumeSampah (ton/bulan)</b>
1	Januari	378 ton
2	Februari	544 ton
3	Maret	821 ton
4	April	809 ton
5	Mei	748 ton
6	Juni	792 ton
7	Juli	756 ton
8	Agustus	731 ton
9	September	798 ton
10	Oktober	787 ton
11	November	828 ton
12	Desember	857 ton

*Sumber : Arsip Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat tahun 2021*

Dari tabel pertumbuhan penduduk dan tabel volume sampah diatas seiring dengan Pertumbuhan penduduk dan pembangunan di kabupaten Lampung Barat yang cukup tinggi merupakan sebab meningkatnya jumlah volume sampah yang tidak bisa dihindari, oleh karena itu Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi peran penting dalam mewujudkan kebersihan lingkungan.

Dalam hal pengelolaan sampah dapat diketahui bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat masih belum dapat dikatakan maksimal. Hal tersebut terlihat dari beberapa hambatan dan masalah sampah yang belum mampu terselesaikan, yaitu: Jumlah pengurangan sampah yang belum mencapai target 20% atau Hitungan timbulan sampah Ke TPA sebanyak 8.854.320 ton, sedangkan jumlah pengurangan sampah yang berhasil dicapai, yakni sebanyak 174.385 ton di tahun 2021. Hal tersebut tentu saja memberikan citra buruk Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang masalah pengelolaan sampah yang diakibatkan Pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Barat saat belum sesuai dengan visi dan

misi Kabupaten Lampung Barat. Adapun Visi dan Misi Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

- A. Visi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022 yakni “TERWUJUDNYA LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA”, Visi ini bermakna masyarakat yang memiliki keadaan ekonomi yang lebih baik, juga menggambarkan keadaan makmur, sehat dan damai. Hebat dalam artian Harmonis, Elok, Berdaya Saing Aman dan Taqwa. Sedangkan sejahtera merupakan tujuan akhir atau keadaan yang diharapkan yang ingin dicapai dalam pembangunan.
- B. Misi, Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022, dirumuskan 5 Misi berikut:
1. Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek penyelenggaraan bencana dan berwawasan lingkungan.
  2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berdaya saing.
  3. Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agrobisnis da agrowisata berbasis sumberdaya lokal.
  4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik.
  5. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipati.

Berbagai permasalahan mengenai sampah di Kabupaten Lampung Barat terus menerus bermunculan, hal itu disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan untuk membuang sampah pada tempat-tempat yang tersedia karena kekurangan jumlah dan penempatan tata letak Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah yang tidak tepat menjadi masalah berikutnya karenan masih banyak ditemukan tumpukan sampah di pinggir jalan raya dan di area perkebunan warga. Selanjutnya yang tidak kalah

pentingnya adalah sehubungan dengan tidak memadainya armada pengangkutan sampah serta pengelolaan sampah yang hanya sekedar diangkut serta dibuang begitu saja tanpa adanya pengolahan selanjutnya di TPA sampah menjadi penyebab tidak terselesaikannya masalah penanganan sampah tersebut. Kabupaten Lampung Barat saat ini sendiri memiliki permasalahan pengelolaan sampah salah satunya terkait dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yaitu TPA Zona 1 di Desa Bahway masih berada pada kriteria open dumping yakni berada pada standar klasifikasi terendah. Open dumping merupakan teknik pembuangan sampah dengan sistem yang paling sederhana, yaitu dengan hanya dibuang begitu saja. Adapun tingkatan sistem di atasnya adalah controlled landfill, yang kemudian berlanjut pada sanitary landfill.

Penggunaan website Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat belum maksimal terlihat pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), data umum pengelolaan sampah Kabupaten Lampung Barat tidak tercatat sama sekali dan terlihat kosong yang seharusnya memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat terkait masalah sampah.

Kerjasama masyarakat yang masih kurang, terbukti dengan masih banyak masyarakat yang tidak tertib dalam membuang sampah sehingga masih terjadi penumpukan sampah. Hal ini dapat memberi citra buruk terhadap kinerja OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) yang menanganinya. OPD yang mengemban tugas Terkait masalah sampah adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat memiliki tugas dan bertanggung jawab dalam menjalankan urusan rumah tangga daerah dan tugas- tugas pokok pada bidang aspek peningkatan kebersihan, pengelolaan sampah, pengangkutan sampah, dan penataan lingkungan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul : “KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM

PENGELOLAAN SAMPAH ( Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat ) “, Selain itu peneliti juga ingin mendeskripsikan secara ilmiah mengenai hal-hal yang mendukung fenomena itu terjadi. Sebagai bahan referensi atas penelitian ini maka Peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dan relevan dengan penelitian sebagai berikut :

**Tabel 3. Penelitian Terdahulu dan Relevan**

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
SRI WAHYUNI GUSTAAF BUDI TAMPI RULLY MAMBO	KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MANADO	Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) Produktivitas Sudah sangat baik dilihat dari tujuan yang ditetapkan dan usaha untuk mewujudkan tujuan antara lain dengan sosialisasi, penerapan hukum yang tegas, menambah tenaga operasional kebersihan dan pemberian pembinaan mengenai pentingnya kebersihan lingkungan. (2) Kualitas Layanan Masih kurang baik terutama kesediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah karena melihat kedepannya produksi sampah akan semakin banyak, sosialisasi dan interaksi terkait permasalahan sampah serta penegasan aturan tentang persampahan masih kurang.. (3) Responsivitas Sudah cukup baik setiap keluhan yang masuk dari masyarakat langsung menindak lanjuti dengan sigap, tegas dan ramah serta tanggap juga rama ketika melayani. Dengan strategi pembinaan, sosialisasi dan peningkatan pelayanan. (4) Responsibilitas Sudah cukup baik, walaupun untuk lama waktu pelayanannya tidak menentu namun pasalnya prosedur pelayanan sampah di dinas lingkungan hidup kota manado sudah termanaj dengan baik. (5) Akuntabilitas Sudah cukup baik dilihat dari peran pemerintah sebagai penyedia pelayanan dasar dan fasilitas pengelolaan sampah serta sebagai pengarahkan juga pembuat kebijakan yang tegas terkait lingkungan hidup dan persampahan.
Muhammad Fahrizal Hasibuan (2021)	Peranan Dinas Lingkungan Hidup	Terdapat empat peran yang mesti dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Rambah yaitu Pertama, peran Dinas

<p>Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu</p>	<p>Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam mengurangi volume sampah selama ini cukup terlaksana. Kedua, peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam pemanfaatan sampah selama ini cukup terlaksana. Ketiga, peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggungjawab dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah selama ini cukup terlaksana. Keempat, peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu sebagai OPD yang bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan sekaligus pengawasan terhadap pengelolaan sampah selama ini cukup terlaksana.</p>
<p>Ayu Sabrina (2019)</p>	<p>KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENANGGULANGAN SAMPAH DI KOTA DUMAI</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisa yang peneliti kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Penanggulangan Sampah di Kota Dumai saat ini sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tujuan, sasaran, dan strategi yang mereka tetapkan sudah berhasil. Namun, realisasinya dilapangan tersebut belum berjalan dengan baik dikarenakan beberapa hal yang membuat tidak bisa untuk pengadaan kegiatan.</p>
<p>Rafael Tatibo Sunasato (2019)</p>	<p>KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ENDE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI KASUS DI EMPAT KECAMATAN DALAM KOTA)</p> <p>Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) Produktivitas DLHD Kabupaten Ende masih minim kegiatan yang dijalankan. kegiatannya tidak membawa pengaruh kepada masyarakat dan juga program yang di jalan hanya dua program yaitu penanganan dan pengurangan sampah. Hal ini dikarenakan kapasitas bidang yang menangani persampahan sangat kecil dan juga terbatasnya anggaran serta saran prasarana selain itu juga SDM yang terbatas dan tidak sesuai dengan ilmu yang ditekuninya. (2) Kualitas Layanan yang diberikan kepada masyarakat belum secara merata, layanan hanya berfokus pada pusat kota sedangkan kecamatan yang berada di pinggiran kota belum di</p>

		perhatikan secara maksimal. (3) Responsivitas terhadap keluhan masyarakat baru sebatas pengangkutan sampah tetapi respon dari Dinas dalam menanggapi keluhan tersebut sudah baik dan cepat. (4) Aknutabilitas dapat dijelaskan bahwa peranggungjawaban dinas kepada pimpinan daerah sudah dijalankan dengan baik setiap tahun. tetapi untuk media bagi masyarakat melakukan pengaduan belum disediakan oleh dinas lingkungan hidup.	_____
			<i>Sumber</i>
			<i>r :</i>
			<i>Diolah</i>
Mirnawati (2018)	ANALISIS KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH DI KOTA METRO (STUDI DI TEMPAT PENGOLAHAN AKHIR SAMPAH (TPAS) KOTA METRO	Tata kelola sampah di Indonesia telah diatur dalam UU No.18 Tahun 2008 yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Kinerja pengelolaan sampah di Kota Metro sebagian besar masih kurang baik dan mendekati cukup baik. Kualitas pengelolaan sampah maksimal yang dicapai adalah cukup baik, yaitu kondisi kebersihan jalan utama, penempatan TPS atau kontainer, kondisi alat pengumpul sampah, kondisi alat pengangkutan sampah dan kualitas petugas kebersihan. Hasil tersebut didapatkan dari pengamatan di beberapa jalan protokol Kota Metro.	<i>oleh peneliti 2022</i>

## 1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lampung Barat . Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat saat ini?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini berfokus terhadap Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Lampung Barat. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk menggambarkan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat saat ini.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Manfaat Praktis**

- a. Sebagai bahan masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam pengelolaan sampah.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini di harapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolan sampah dan diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan sampah.

##### **1.4.2. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambahkan dan memperluas wawasan keilmuan, khususnya dalam kajian ilmu Pemerintahan tentang kinerja organisasi Publik.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Kinerja

#### 2.1.1. Pengertian Kinerja

Istilah kinerja merupakan terjemahan dari performance yang sering diartikan oleh para cendekiawan sebagai penampilan, unjuk kerja, atau prestasi. (Yeremias T. Keban 2004 : 191).

Definisi kinerja organisasi yang dikemukakan oleh Bastian dalam Hessel Nogi Tangkilisan (2005 : 175) sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut. Senada dengan pendapat Bastian dalam Hessel Nogi Tangkilisan tersebut,

Encyclopedia of Public Administration and Public Policy Tahun 2003 dalam Yeremias T. Keban (2004 : 193) juga menyebutkan kinerja dapat memberikan gambaran tentang seberapa jauh organisasi mencapai hasil ketika dibandingkan dengan pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas atau program yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

### **2.1.2. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja**

Kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas atau program yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang dipengaruhi oleh beberapa factor.

Yeremias T. Keban (2004 : 203) untuk melakukan kajian secara lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penilaian kinerja di Indonesia, maka perlu melihat beberapa faktor penting sebagai berikut.

Kejelasan tuntutan hukum atau peraturan perundangan untuk melakukan penilaian secara benar dan tepat. Dalam kenyataannya, orang menilai secara subyektif dan penuh dengan bias tetapi tidak ada suatu aturan hukum yang mengatur atau mengendaikan perbuatan tersebut.

Manajemen sumber daya manusia yang berlaku memiliki fungsi dan proses yang sangat menentukan efektivitas penilaian kinerja. Aturan main menyangkut siapa yang harus menilai, kapan menilai, kriteria apa yang digunakan dalam sistem penilaian kinerja sebenarnya diatur dalam manajemen sumber daya manusia tersebut. Dengan demikian manajemen sumber daya manusia juga merupakan kunci utama keberhasilan sistem penilaian kinerja.

Kesesuaian antara paradigma yang dianut oleh manajemen suatu organisasi dengan tujuan penilaian kinerja. Apabila paradigma yang dianut masih berorientasi pada manajemen klasik, maka penilaian selalu bisa kepada pengukuran tabiat atau karakter pihak yang dinilai, sehingga prestasi yang seharusnya menjadi fokus utama kurang diperhatikan.

Komitmen para pemimpin atau manajer organisasi publik terhadap pentingnya penilaian suatu kinerja. Bila mereka selalu memberikan komitmen yang tinggi terhadap efektivitas penilaian kinerja, maka para penilai yang ada dibawah otoritasnya akan selalu berusaha melakukan penilaian secara tepat dan benar.

### **2.1.3. Indikator Pengukuran Kinerja**

Menurut Indriyo Gito Kusumo, (Komang Ardana. Dkk,2008:1) Konsep kinerja organisasi juga menggambarkan bahwa setiap organisasi publik memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dapat dilakukan pengukuran kinerjanya dengan menggunakan indikator-indikator kinerja yang ada untuk melihat apakah organisasi tersebut sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan untuk mengetahui tujuannya sudah tercapai atau belum.

McDonald dan Lawton dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005 : 174) mengemukakan indikator kinerja antara lain : output oriented measures throughput, efficiency, effectiveness. Selanjutnya indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Efficiency atau efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Effectiveness atau efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi.

Zeithaml, Parasuraman dan Berry dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005 : 175) menjelaskan tentang indikator yang digunakan untuk menilai kinerja organisasi, yang terdiri atas beberapa faktor berikut :

1. Tangibles atau ketampakan fisik, artinya ketampakan fisik dari gedung, peralatan, pegawai, dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh providers.
2. Reliability atau reabilitas adalah kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat.
3. Responsiveness atau responsivitas adalah kerelaan untuk menolong customers dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas.
4. Assurance atau kepastian adalah pengetahuan dan kesopanan para pekerja dan kemampuan mereka dalam memberikan kepercayaan kepada customers.
5. Emphaty adalah perlakuan atau perhatian pribadi yang diberikan oleh providers kepada customers.

Larry D. Stout dalam Hessel Nogi Tangkilisan (2005 : 174) mengemukakan bahwa pengukuran atau penilaian kinerja organisasi merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (mission accomplishment) melalui hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun suatu proses.

Berbeda dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Bastian dalam Hessel Nogi Tangkilisan (2005 : 173) bahwa pengukuran dan pemanfaatan penilaian kinerja akan mendorong pencapaian tujuan organisasi dan akan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus menerus.

Dalam pengukuran sebuah kinerja (performance measurement) mempunyai pengertian suatu proses penilaian tentang kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dari sasaran dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, termasuk informasi atas efisiensi serta efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan organisasi.

Untuk dapat mempelajari kinerja suatu organisasi, harus diketahui ukuran keberhasilan untuk menilai kinerja tersebut. Sehingga indikator atau ukuran kinerja itu tentunya harus dapat merefleksikan tujuan dan misi dari organisasi yang bersangkutan, karena itu ukuran dari tingkat kinerja dari suatu organisasi public secara lengkap

Menurut J. Fred Western dalam menjelaskan bahwa kinerja dalam suatu organisasi terbagi atas tiga kategori (Prawirisentono:2000), yakni:

1. Kinerja Strategi

Kinerja ini dilihat dari ketetapan organisasi dalam memilih lingkungannya untuk beradaptasi (penyesuaian) suatu organisasi/instansi dalam lingkungan dimana tempat organisasi/instansi tersebut bekerja. Kinerja strategik ini dipegang oleh top-management, manajemen tingkat tinggi atau pemimpin.

2. Kinerja Administrasi

Kinerja ini berkaitan dengan kinerja administrasi organisasi, termasuk di dalamnya tentang struktur administrasi yang mengatur hubungan otoritas (wewenang) dari tanggung jawab dari orang yang menduduki jabatan atau bekerja pada unit-unit kerja yang terdapat dalam organisasi.

3. Kinerja Operasional

Kinerja ini berkaitan dengan efektivitas penggunaan setiap sumber daya yang digunakan oleh instansi.

Agus Dwiyanto (2006 : 50) mengukur kinerja birokrasi publik berdasar adanya indikator yang secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian General Accounting Office (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

### 2. Kualitas Layanan

Kualitas Layanan yaitu dengan mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Kepuasan masyarakat dapat menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi. Isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik.

### 3. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakeselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan

organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

#### 4. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.

#### 5. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi public memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Kinerja organisasi publik bukan saja dapat diketahui dari standar internal yang dibuat dan dikembangkan oleh pemerintah atau organisasi publik, seperti pencapaian target. Kinerja semestinya juga perlu diukur dari standar nilai eksternal, seperti norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik

dikatakan mempunyai akuntabilitas tinggi jika tindakan/kegiatan yang dilakukan dirasa benar, yakni sejalan terhadap norma dan nilai yang tumbuh di masyarakat.

## **2.2. Sampah**

### **2.2.1. Pengertian Sampah**

Dalam Undang – Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah definisi sampah yaitu sisa kegiatan sehari – hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Menurut definisi World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 tahun 2008 menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari - hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.

Aminudin (2013;48) ”sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah diartikan oleh manusia menurut keterpakaianya. Akan tetapi, karena dalam kehidupan manusia dalam konsep lingkungan maka sampah dapat dibagi berdasarkan jenisnya”. Sampah yang ada di sekitar adalah sampah yang sangat beraneka ragam, mulai dari rumah, pasar, perkebunan, persawahan, perternakan, dan lain sebagainya.

### **2.2.2. Jenis-jens Sampah**

Menurut Basriyanto (2007:18) berdasarkan komposisi/ asalnya sampah dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Sampah organik

Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, pembungkus (selain kertas, karet dan plastik), tepung, sayuran, kulit buah, daun dan ranting.

## 2. Sampah Anorganik (non-organik)

Sampah anorganik yakni sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati, baik sebagai produk sintetik maupun hasil pengolahan teknologi bahan tambang, hasil olahan bahan hayati dan sebagainya. Sampah anorganik dibedakan menjadi :

- a. Sampah logam dan produk-produk olahannya
- b. Sampah plastic
- c. Sampah kertas
- d. Sampah kaca dan keramik

Sebagian besar zat anorganik hanya dapat terurai dalam waktu yang cukup lama terutama pada sampah rumah tangga yang merupakan plastik, kaca, dan kaleng.

### 2.2.3. Sumber Sampah

Menurut Suwerda (2012) sumber sampah dapat diklasifikasikan :

- a. Sampah Rumah Tangga Terdapat beberapa jenis sampah yang dihasilkan oleh sampah rumah tangga yaitu sampah organik, seperti sisa makanan, sampah dari kebun/halaman dan sampah organik seperti bekas perlengkapan rumah tangga, gelas, kain, kardus, tas bekas, dan lain sebagainya. Selain itu terdapat pula sampah rumah tangga yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) seperti bahan komestik, batu baterai bekas yang sudah tidak terpakai, dan lain-lain. 11

- b. Sampah Pertanian Kegiatan pertanian juga dapat menimbulkan sampah yang pada umumnya berupa sampah yang mudah membusuk seperti sampah organik (rerumputan, dan lain-lain). Selain sampah organik, kegiatan pertanian juga menghasilkan sampah berkategori B3 seperti pestisida dan juga pupuk buatan. Kedua hal tersebut memerlukan penanganan yang tepat agar pada saat dilakukan pengolahan tidak mencemari lingkungan maupun manusia.
- c. Sampah Sisa Bangunan Dari kegiatan pembuatan gedung maupun sesudahnya juga menghasilkan sampah selama ini seperti tripleks, potongan kayu, dan bamboo. Selain itu, sampah yang dihasilkan juga seperti kaleng bekas, potongan besi, potongan kaca, dan sebagainya.
- d. Sampah Perdagangan Sampah dari perdagangan biasanya berasal dari beberapa tempat yaitu pasar tradisional.
- e. Sampah Industri Segala hasil dari kegiatan di industri yang tidak digunakan kembali atau tidak dapat dimanfaatkan. Sampah dari kegiatan industri menghasilkan jenis sampah yang sesuai dengan bahan baku serta proses yang dilakukan. Sampah dapat diperoleh baik dari proses input, produksi, maupun output.

Jika dilihat dari uraian diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa sampah merupakan hasil dari kegiatan konsumtif yang dilakukan oleh manusia yang jumlahnya akan semakin meningkat. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat harus berperan aktif dalam menekan jumlah sampah yang ada di kawasan Kabupaten Lampung Barat.

### 2.3. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah suatu upaya untuk mengurangi volume sampah atau merubah bentuk sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat dengan berbagai macam cara. Teknik pengelolaan sampah yang pada awalnya menggunakan pendekatan kumpul, angkut, buang.

Proses pengelolaan adalah upaya dalam mengurangi jumlah sampah sebelum diangkut ketempat pembuangan akhir. Proses pengelolaan dapat dilakukan dengan proses daur ulang dengan pemanfaatan kembali beberapa komponen sampah yang bisa digunakan atau dengan proses pengomposan. Disini dapat diartikan pengelolaan sampah yaitu mencegah timbulnya sampah secara maksimal dan memanfaatkan kembali sampah serta menekankan dampak negatif sekecil-kecilnya dari aktifitas pengelolaan sampah.

Menurut Wahid Iqbal dan Nurul C (2009: 277) Pengelolaan Sampah merupakan proses dimana sebuah pengaturan mulai dari penimbunan, penyimpanan, pengumpulan pengangkutan, serta pembuangan sesuai dengan prinsip kesehatan dan keindahan.

Berdasarkan Undang Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, “pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah”.

Menurut Sejati Kuncoro (2009:24) Pengelolaan sampah merupakan segala kegiatan yang di perlukan guna menangani sampah mulai dari terciptanya sampah tersebut sampai pada proses pembuangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Penanganan Sampah merupakan

serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

- 1) Pemilahan dilaksanakan ditempat diciptakannya sampah dan dipilah berdasarkan jenisnya.
- 2) Pengumpulan dilaksanakan sejak sampah berada dari lingkungan rumah tangga sampai ke TPS begitu pula saat di TPA dengan tetap sesuai dengan jenisnya.
- 3) Pengangkutan merupakan suatu bentuk kegiatan membawa sampah dari lingkungan rumah tangga atau TPS kemudian dibawa ketempat pengolahan terakhir atau TPA.
- 4) Pengolahan dilaksanakan dengan cara meububah bentuk atau komposisi dari sampah yang dilaksanakan di TPS atau TPA.
- 5) Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan cara mengembalikan sampah ketempat media lingkungan dengan tetap menjaga lingkungan secara aman.

Departemen Pekerjaan Umum (2007) menjelaskan bahwa prinsip 3R dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Prinsip pertama adalah reduce atau reduksi sampah, yaitu upaya untuk mengurangi timbulan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dapat dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan. Setiap sumber dapat melakukan upaya reduksi sampah dengan cara mengubah pola hidup konsumtif, yaitu perubahan kebiasaan dari yang boros dan menghasilkan banyak sampah menjadi hemat/efisien dan hanya menghasilkan sedikit sampah.
2. Prinsip kedua adalah reuse yang berarti menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah (tanpa melalui proses pengolahan), seperti menggunakan kertas bolak balik, menggunakan kembali botol bekas minuman untuk tempat air, dan lain-lain. Dengan demikian reuse dapat memperpanjang usia penggunaan barang melalui perawatan dan pemanfaatan kembali barang secara langsung;

3. Prinsip ketiga adalah recycle yang berarti mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak berguna menjadi bahan lain atau barang yang baru setelah melalui proses pengolahan. Beberapa sampah dapat didaur ulang secara langsung oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi dan alat yang sederhana, seperti mengolah sisa kain perca menjadi selimut, kain lap, keset kaki dan sebagainya, atau sampah dapur yang berupa sisa-sisa makanan untuk dijadikan kompos.

Menurut Slamet (2009:156-157) Pengelolaan sampah juga ,mempunyai pendukung dan penghambat dalam tujuan meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan sampah. faktor-faktor tersebut yaitu:

1. Meningkatnya tingkat hidup masyarakat, yang tidak disertai dengan keselarasan pengetahuan tentang persampahan.
2. Semakin sulitnya mendapatkan lahan sebagai tempat pembuangan akhir (TPA) sampah, selain tanah serta formasi tanah yang tidak cocok bagi pembuangan sampah.
3. Semakin banyak masyarakat yang keberatan daerahnya dijadikan tempat pembuangan sampah.
4. Kurangnya pengawasan dan pelaksanaan peraturan.
5. Keterbatasan dana, mengingat bahwa sampah saat ini kebanyakan dikelola oleh pemerintah.
6. Kebiasaan pengelolaan sampah yang tidak efisien, tidak benar, yang menimbulkan permasalahan terhadap pencemaran, turunnya harga tanah karena daerah yang turun kadar estetikanya.
7. Pengelolaan sampah kurang memperhatikan faktor non teknis seperti partisipasi masyarakat dan penyuluhan tentang hidup sehat dan bersih.
8. Terbatasnya penguasaan teknologi pengelolaan sampah.

Dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan sampah merupakan kegiatan bertahap yang pada dasarnya dilakukan untuk mengolah sampah agar dapat diproses menjadi bentuk lain yang memberikan manfaat dan tidak berbahaya bagi

lingkungan. Sampah semakin hari kian memburuk untuk dikendalikan, sehingga upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat salah satunya yaitu, menggunakan kewenangannya dalam menjalankan tugas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk kebersihan lingkungan agar tercipta masyarakat yang disiplin tidak membuang sampah sebarangan. Kesadaran masyarakat sangat berperan penting dalam kebersihan lingkungan, dan lingkungan yang indah serta sehat.

#### **2.4. Kerangka Berpikir**

Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang hingga saat ini masih terjadi di berbagai daerah akibat dari pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambah volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Ironisnya, permasalahan sampah yang sering muncul selama ini, tidak membuat para stakeholder yang bertanggung jawab memiliki kepekaan untuk mengatasi masalah tersebut.

Kabupaten Lampung Barat merupakan kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Volume sampah yang dihasilkan akan terus meningkat seiring pada meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Barat. Masalah sampah merupakan landasan dari peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dalam mengatasi sampah di Kabupaten Lampung Barat. Dinas Lingkungan Hidup memiliki kekuasaan dalam jalannya pemerintahan dalam aspek lingkungan. Kekuasaan yang dimiliki tersebut memberikan peranan penting bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat mengatasi persoalan sampah.

Penanganan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Barat saat ini maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan. permasalahan mengenai sampah di Kabupaten Lampung itu disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan untuk membuang sampah pada tempat-tempat yang tersedia karena kekurangan jumlah dan penempatan tata letak Tempat

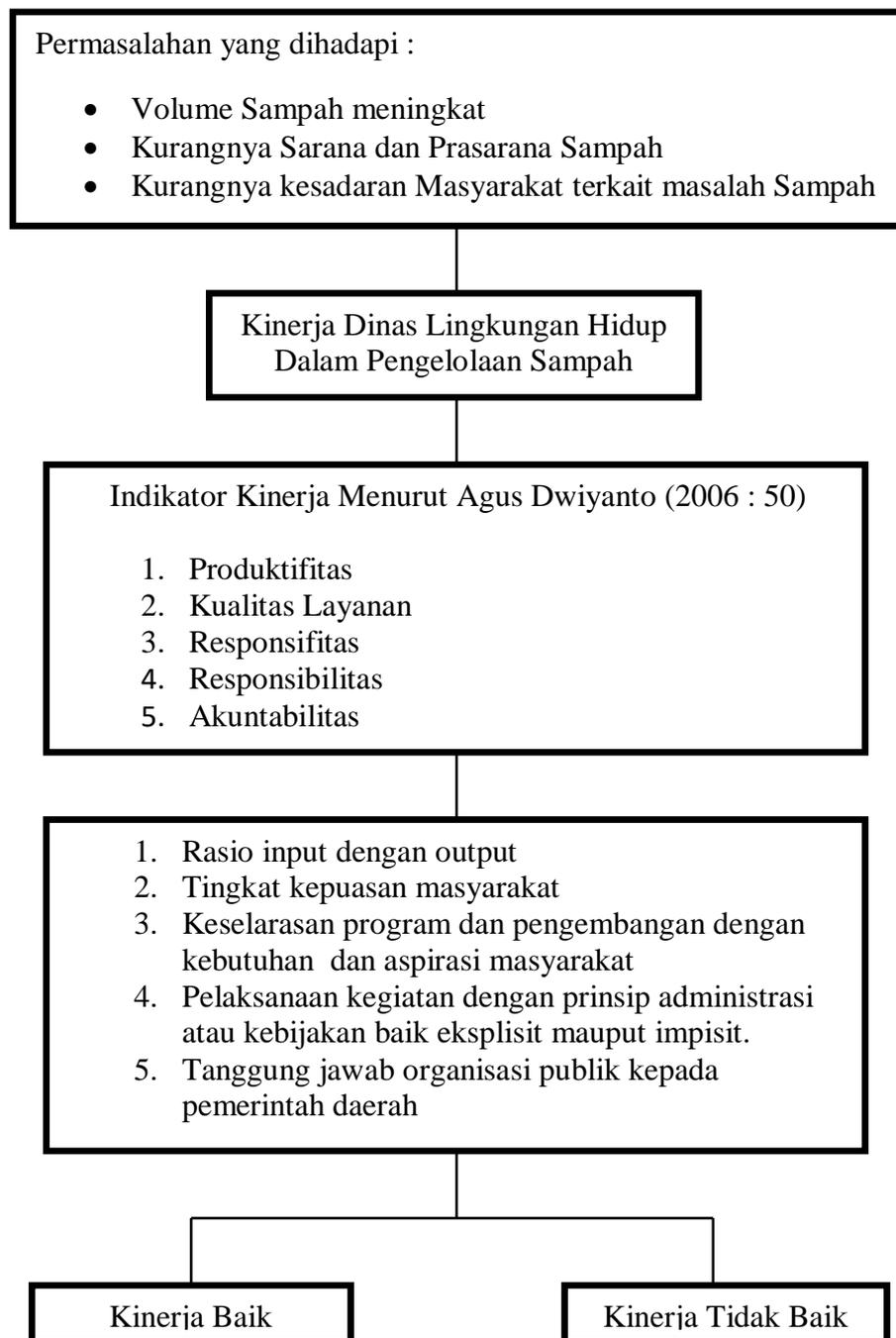
Penampungan Sementara (TPS) sampah yang tidak tepat menjadi masalah berikutnya karena masih banyak ditemukan tumpukan sampah di pinggir jalan raya dan di area perkebunan warga. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah sehubungan dengan tidak memadainya armada pengangkutan sampah serta pengelolaan sampah yang hanya sekedar diangkut serta dibuang begitu saja tanpa adanya pengolahan selanjutnya di TPA sampah menjadi penyebab tidak terselesaikannya masalah penanganan sampah tersebut. Kabupaten Lampung Barat saat ini sendiri memiliki permasalahan pengelolaan sampah salah satunya terkait dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yaitu TPA Zona 1 di Desa Bahway masih berada pada kriteria open dumping yakni berada pada standar klasifikasi terendah. Hal ini dapat memberi citra buruk terhadap kinerja OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) yang menanganinya. OPD yang mengemban tugas Terkait masalah sampah adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat memiliki tugas dan bertanggung jawab dalam menjalankan urusan rumah tangga daerah dan tugas-tugas pokok pada bidang aspek peningkatan kebersihan, pengelolaan sampah, pengangkutan sampah, dan penataan lingkungan di Kabupaten Lampung Barat.

Untuk mengukur kinerja Dinas Lingkungan Hidup menggunakan ukuran kinerja organisasi publik menurut Agus Dwiyanto (2006 : 50) yaitu yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, tanggungjawab, dan akuntabilitas. Produktivitas adalah ukuran seberapa besar pelayanan publik itu menghasilkan yang diharapkan, dari segi efisien dan efektivitas. Kualitas pelayanan adalah ukuran citra yang diakui masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan, yaitu masyarakat merasa puas atau tidak puas. Responsivitas adalah ukuran kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Tanggungjawab adalah ukuran apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.

Akuntabilitas adalah ukuran seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat atau konsisten dengan kehendak rakyat

Melalui kelima indikator tersebut dapat dianalisis bagaimana kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dalam Pengelolaan Sampah pada saat ini. Landasan teori dan kelima indikator tersebut menjadi dasar analisis dan pijakan teoritik untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lampung Barat dapat dinilai dengan kelima indikator tersebut. Sehingga dapat diketahui Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lampung Barat 2022.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan meneliti Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lampung Barat . Untuk memudahkan uraian ini, maka di sederhanakan dalam tampilan visualisasi kerangka berfikir penelitian yang dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut :



*Sumber : Diolah peneliti pada tahun 2023*

**Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian**

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini mengkaji tentang Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat, dengan tipe penelitian menggunakan deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mengukur secara cermat terhadap fenomena sosial tertentu dengan menggambarkan konsep. Menurut Bogman dan Taylor, yang dikutip Moleong (1995:2) penelitian deskriptif kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/ lisan dari orang-orang atau perilaku yang dicermati.

#### **3.2. Lokasi Penelitian**

Penulis menetapkan Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dalam melakukan penelitiannya. Alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan sampah di Kabupaten Lampung Barat yang mana tiap tahunnya selalu meningkat. Lembaga atau instansi pemerintah daerah yang bersangkutan dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup belum berhasil mengatasi dan menangani sampah yang berada di Kabupaten Lampung Barat. Maka untuk itu perlu ditindak lanjuti kinerja dari dinas yang berkaitan.

### 3.3. Fokus Penelitian

Penulis menjadikan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat sebagai fokus dalam penelitian ini. yang di ukur menggunakan lima indikator kinerja menurut Agus Dwiyanto (2006 : 50) yaitu :

1. Produktifitas . Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. dengan mengukur tingkat efisiensi, efektivitas pelayanan, dan tingkat pelayanan publik dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan
2. Kualitas Layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Kepuasan masyarakat dapat menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi.
3. Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
4. Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.
5. Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat.

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah Masyarakat (*Stakeholder*) dan Tim Sukses yang terlibat langsung dalam proses Kabupaten Lampung Barat, responden akan dimintai keterangan terkait informasi yang berkaitan dengan focus penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara menggali informasi langsung kepada objek penelitian dan data primer juga bisa didapatkan dari catatan lapangan yang berkaitan dengan focus kajian penelitian. Penelitian ini menggunakan informan yang dipilih berdasarkan pada subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data juga bersedia memberikan informasi, dalam hal ini penulis meminta keterangan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat.

### 2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung dan memperkuat data primer, data sekunder biasanya bersumber dari dokumentasi, berupa media massa, dan sumber lainnya yang dapat diterima.

## **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Kegiatan pengumpulan data dibutuhkan langkah – langkah yang tepat agar data yang diperoleh dan yang disajikan aktual dan benar. Informasi yang akurat sangat menunjang penelitian agar data dapat dipertanggung jawabkan. Metode penelitian kualitatif akan menghasilkan data deskriptif yang focus penelitian seperti yang dilihat dan dialami oleh subjek penelitian.

Data menurut Ridwan dalam Ikbar (2012:155) adalah “bahan mentah” yang mesti diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan informasi atau keterangan baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta. Kemudian Menurut Nazir (2011:174) “pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan” Metode teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam pengumpulan dalam penelitian ini adalah :

## A. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau keterangan lisan dari seseorang yang disebut responden melalui suatu percakapan yang sistematis dan terorganisasi. Wawancara dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (interviewer) dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai (interviewee) untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil percakapan tersebut dicatat atau direkam oleh pewawancara (Silalahi 2012:312).

Menurut Nazir (2011:194) menyebutkan bahwa : wawancara berbeda dengan percakapan sehari-hari. Beberapa hal yang membedakannya antara lain:

- a. Pewawancara dan responden biasanya belum saling mengenal sebelumnya;
- b. Responden selalu menjawab pertanyaan;
- c. Pewawancara selalu bertanya;
- d. Pewawancara tidak menjuruskan pertanyaan kepada suatu jawaban, tetapi harus selalu bersifat netral;
- e. Pertanyaan yang ditanyakan mengikuti panduan yang telah dibuat sebelumnya.

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2012:233-235) ada beberapa macam wawancara, yaitu:

### a. Wawancara Tersruktur (Structured interview)

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang

alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. Dengan wawancara terstruktur ini pula, pengumpul data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. Supaya setiap pewawancara mempunyai keterampilan yang sama, maka diperlukan training kepada calon pewawancara;

b. Wawancara Semiterstruktur (Semistructure interview)

Jenis wawancara ini sudah termasuk kategori in-dept interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan “permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan; dan

c. Wawancara Tak Berstruktur (Unstructured interview)

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Berdasarkan penjelasan diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa wawancara merupakan kegiatan tanya jawab oleh peneliti dan informan untuk memperoleh suatu data. Dalam proses wawancara peneliti menggunakan semi terstruktur sehingga mengacu pada pedoman wawancara dan dapat mendengar ide-ide yang dikemukakan oleh informan guna menunjang data-data.

## B. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan gaya atau tehnik yang dilakukan oleh penulis dengan cara melihat langsung apa yang sedang terjadi dilapangan sehingga dari pengamatan tersebut dapat disimpulkan secara nyata tentang suatu gejala yang berhubungan dengan penelitian ini.

Observasi adalah suatu alat guna untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari lapangan maka harus sesuai dengan fakta dan tidak dapat dimanipulasi atau diatur. Observasi dapat dilakukan dengan meninjau sistem kerja yang dijalankan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat untuk mengamati faktor penunjang dan penghambatnya Pelaksanaan observasi difokuskan kepada lingkungan yang berkaitan dengan sampah, seperti pengamatan terhadap kondisi masalah sampah di Kabupaten Lampung Barat dan upaya yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dalam pengelolaan sampah saat ini.

## C. Dokumentasi

Teknik ini berupa pengumpulan data yang berhubungan dengan kajian penelitian. Dimana peneliti mencari, mengumpulkan data berupa dokumentasi yang penulis peroleh dari objek penelitian.

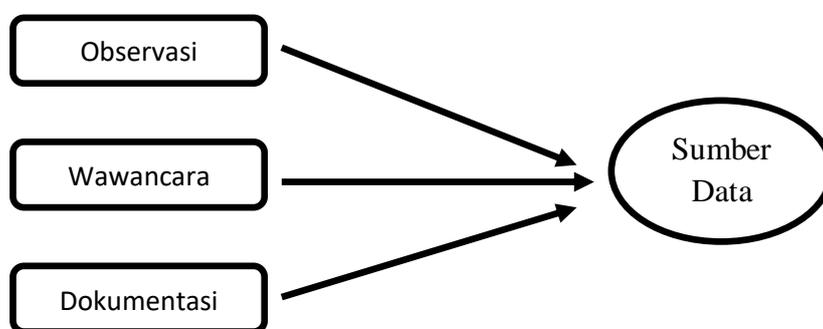
Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya". Cara atau tehnik dokumentasi merupakan tehnik yang paling sederhana yang diterapkan dibandingkan dengan metode yang lain yang digunakan karena tehnik ini ditujukan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan apa yang diteliti (Arikunto (2010:274).

Metode ini dilaksanakan guna mendapatkan data yang belum diperoleh dari metode wawancara, dengan metode ini peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada seperti data dari lakip, renstra, foto dan arsip yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat

#### D. Triangulasi

Gabungan dari ketiga teknik pengumpulan data disebut Triangulasi, menurut Sugiyono (2012:241) berpendapat bahwa triangulasi adalah teknik dimana menggabungkan data dari sumber yang telah ada. Bila peneliti menggunakan teknik triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data yaitu mengecek data dengan berbagai teknik pengumpulan dan berbagai sumber data.

**Gambar 2. Teknik Pengumpulan Data.**



*Sumber : Sugiyono (2012:242)*

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi, karena dengan ini akan lebih meningkatkan kekuatan data dan pemahaman mendalam terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dalam mengatasi sampah di Kabupaten Lampung Barat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan data yang di

terapkan penulis di penelitian peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi sampah di Kabupaten Lampung Barat adalah wawancara semi terstruktur, observasi, dokumentasi, dan triangulasi yang mampu memahami dan mengumpulkan data lebih mendalam.

Dalam Pelaksanaan Wawancara penulis menentukan beberapa objek yang dijadikan sebagai informan, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4. Daftar Informan**

	<b>Informan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Alasan</b>
1 .	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat	1	Kepala Dinas merupakan pemegang kewenangan tertinggi di lingkup Dinas Lingkungan Hidup
2 .	Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan	1	Merupakan bagian yang menyusun rencana dalam pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup
3 .	Kepala Bidang Kebersihan Lingkungan Hidup	1	Membidangi pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup
4 .	Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan	1	Untuk mengetahui apa saja sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup
5 .	Seksi Layanan Kebersihan	1	Untuk mengetahui arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup
6 .	Masyarakat	4	Untuk mengetahui penyebab tidak terkendalinya sampah

*Sumber : Diolah oleh Penulis 2022*

### **3.6. Teknik Pengolahan Data**

Data primer dan data skunder yang telah didapatkan tidak langsung dianalisis melainkan diperiksa terlebih dahulu hal ini bertujuan untuk

menguji data dan mengetahui jika data mengalami kekurangan atau kesalahan.

Setelah itu data kemudian diperbaiki secara keseluruhan sehingga menghasilkan data yang jelas dan lengkap serta konsisten.ahap selanjutnya yaitu setelah data terkumpul, Peneliti mengolah data tersebut. Teknik pengolahan data menurut (Efendi dkk dalam Singarimbun, 2008:240) terdiri dari:

### 1. Editing

Editing adalah kegiatan dalam Penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali daya yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses ini, Peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan memilih serta menentukan data-data yang diperlukan untuk Penelitian. Mengolah kegiatan observasi yaitu Peneliti mengumpulkan data-data yang menarik dari hasil pengamatan sehingga dapat ditampilkan dengan baik.

### 2. Interpretasi Data

Pada tahapan ini data Penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil Penelitian. Interpretasi Penelitian juga dilakukan dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, Peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak. Hasil Penelitian dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran juga ditentukan agar relevan dengan hasil Penelitian.

### 3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilaksanakan pada saat pengumpulan data dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu.

Menurut Sugiyono (2012:244): Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model Miles dan Huberman yang dikutip Sugiyono (2012:246-253) memiliki tiga kegiatan yaitu :

a. Data Reduction (reduksi data)

Data yang didapatkan oleh penulis saat penulis turun lapangan jumlahnya cukup banyak, karena semakin lama penulis berada di lapangan maka semakin banyak data yang didapatkan, oleh karena itu maka data tersebut harus dikumpulkan dan dicatat. Untuk itu data yang didapatkan tadi dengan jumlah yang cukup banyak maka penulis melakukan peringkasan data agar sesuai dan terfokus kepada apa yang dibutuhkan penulis sesuai dengan judul yang diangkat. Dengan demikian data yang telah didapatkan dan dirangkum oleh penulis dapat menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.

b. Data Display (penyajian data)

Data yang telah didapatkan tadi maka selanjutnya penulis menyajikannya berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

Sehingga apa yang ditampilkan oleh penulis sangat mudah dimengerti yang dapat direncanakan langkah selanjutnya. Dan

c. Conclusion Drawing/Verification (penarikan kesimpulan/ verifikasi)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis, atau teori.

Langkah langkah diatas mampu memfasilitasi dalam memperoleh data dari sumber data karena memiliki tujuan akhir yang sama. Data yang diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan substansi yang saling mendukung dan terkait. Pengumpulan data akan didapatkan secara maksimal apabila ada pernyataan dan bukti yang kuat dari pengamatan yang dilakukan peneliti.

Peneliti akan melakukan pemilahan data melalui reduksi data terhadap data yang dirasa tidak perlu untuk menguatkan data pendukung serta penarikan kesimpulan yang masih berupa hipotesis yang bersifat naratif dalam pelaksanaan magang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.

### 3.8. Keabsahan Data

Agar dapat menentukan keabsahan data dalam Penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana dikemukakan Moleong (2011:324) yang dalam pemeriksaan data menggunakan empat kriteria :

- a. Derajat Kepercayaan (*Credibility*) Penetapan derajat kepercayaan menggunakan beberapa teknik pemeriksaan untuk memeriksa derajat kepercayaan Penelitian yaitu salah satunya melalui triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain yang diluar data itu untuk keperluan

pengecakan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin (dalam Patton, Moelong, 2011:331) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber, metode, penyidik, dan teori. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam Penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan ):

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
  2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
  3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi Penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
  4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
  5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
- b. Keteralihan (*Transferability*) Teknik ini menuntut Peneliti agar melaporkan hasil Penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat Penelitian diselenggarakan. Uraiannya harus mengungkapkan secara khusus agar dapat dipahami. Temuan tersebut merupakan penafsiran yang dilakukan dalam bentuk uraian rinci dengan segala macam pertanggung jawaban.
- c. Kebergantungan (*Dependity*) Merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam Penelitian nonkualitatif. Jika dua atau beberapa kali diadakan pengulangan suatu studi dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan reliabilitasnya tercapai.

- d. Kepastian (*Confirmability*) Dalam Penelitian kualitatif uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan. Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga dengan disepakati hasil Penelitian oleh banyak orang maka hasil Penelitian tidak lagi bersifat subjektif tapi sudah objektif.

Memeriksa kebenaran data menggunakan triangulasi dengan sumber yang berarti membandingkan data hasil wawancara kepada informan yang berbeda. Peneliti juga dapat melakukannya dengan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai macam sumber data, dan memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan dilakukan.

### **3.9. Informan Penelitian**

Memahami kancah penelitian yang lebih aman, Peneliti berpikir untuk menemukan sumber data atau informan yang tepat (*key informan*). Selain itu peneliti juga memahami sumber data maupun kancah penelitian dengan *verstehen*. Dalam perspektif fenomenologis, *verstehen* sangat diperlukan peneliti didalam kancah penelitian. *Verstehen* adalah cara memahami situasi yang ditemui di lapangan (Anis dan Kandung, 2014:9).

Dalam Pelaksanaan Penelitian penulis menentukan beberapa objek yang dijadikan sebagai informan, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5. Daftar Informan**

	<b>Informan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Alasan</b>
1 .	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat	1	Kepala Dinas merupakan pemegang kewenang kewenangan tertinggi di lingkup Dinas Lingkungan Hidup
2 .	Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan	1	Merupakan bagian yang menyusun rencana dalam pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup
3 .	Kepala Bidang Kebersihan Lingkungan Hidup	1	Membidangi pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup
4 .	Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan	1	Untuk mengetahui apa saja sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup
5 .	Seksi Layanan Kebersihan	1	Untuk mengetahui arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup
6 .	Masyarakat	4	Untuk mengetahui penyebab tidak terkendalinya sampah

*Sumber : Diolah oleh Penulis 2022*

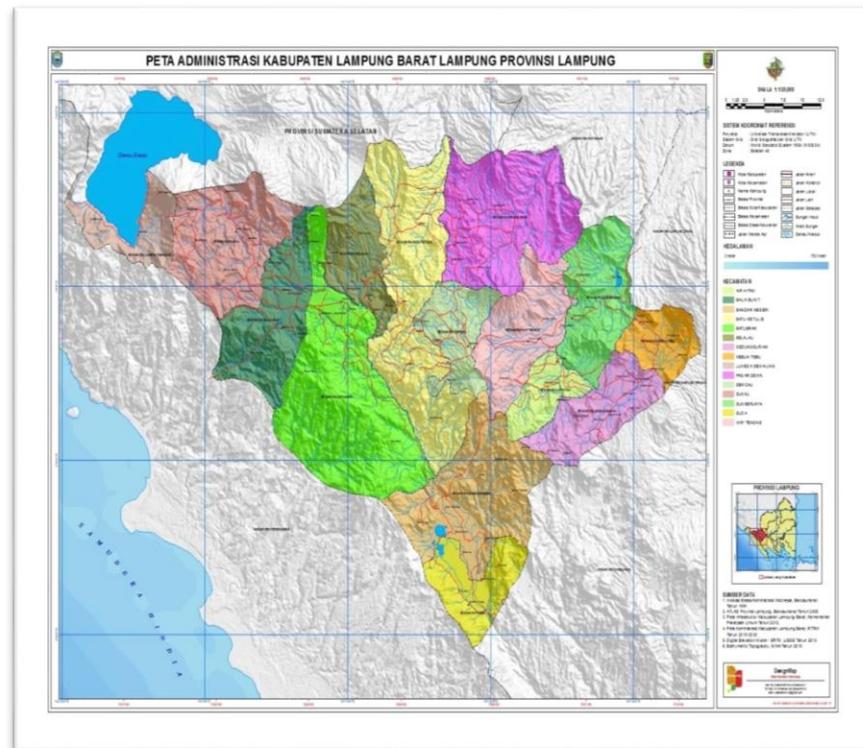
## **IV. GAMBARAN UMUM**

### **4.1. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Barat**

#### **4.1.1. Sejarah Pembentukan Kabupaten Lampung Barat**

Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu kabupaten dari jumlah 15 kabupaten dan kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Barat memiliki ibu kota kabupaten yakni Liwa yang terletak di Kecamatan Balik Bukit. Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1991 tanggal 16 Agustus 1991 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara.

Kabupaten ini di dominasi oleh daerah perbukitan dan pantai disepanjang pesisirnya sebelum dimekarkan menjadi Kabupaten Pesisir Barat, daerah pengunungan yang merupakan bukit barisan dan memiliki Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang merupakan hutan konservasi. Kabupaten Lampung Barat berada diketinggian 50>1000 mdpl, dan pada daerah tertentu di Kabupaten Lampung Barat ditemukan aktivitas vulkanis berupa panas bumi.



**Gambar 3. Peta Kabupaten Lampung Barat.**

#### **4.1.2. Visi dan Misi Kabupaten Lampung Barat**

Visi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022 yakni “TERWUJUDNYA LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA”, Visi ini bermakna masyarakat yang memiliki keadaan ekonomi yang lebih baik, juga menggambarkan keadaan makmur, sehat dan damai. Hebat dalam artian Harmonis, Elok, Berdaya Saing Aman dan Taqwa. Sedangkan sejahtera merupakan tujuan akhir atau keadaan yang diharapkan yang ingin dicapai dalam pembangunan.

Misi, Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022, dirumuskan 5 Misi berikut:

1. Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek penyelenggaraan bencana dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berdaya saing.
3. Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agrobisnis da agrowisata berbasis sumberdaya lokal.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik.
5. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipati.

#### **4.1.3. Kondisi Pemerintahan**

Kabupaten Lampung Barat yang dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat periode 2017 – 2022, Bapak Parosil Mabsus dan Bapak Mad Hasnurin. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan kabupaten ini. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada saat menjalankan roda pemerintahan diharapkan mampu menyelesaikan dan menjawab apa saja yang menjadi permasalahan di Kabupaten Lampung Barat dalam hal sosial, ekonomi, dan politik.

Masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati saat ini telah berusaha menyelesaikan masalah sampah di Kabupaten Lampung Barat yang kian meningkat menjadi sebuah permasalahan yang semakin sulit dikendalikan, maka dari pada itu permasalahan sampah menjadi sorotan pemerintahan yang harus di selesaikan sebelum menjadi semakin rumit.

#### 4.1.4. Kondisi Kependudukan

Kepadatan penduduk di Kabupaten Lampung Barat tahun 2017 mencapai 148 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan Penduduk di 15 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Balik Bukit dengan kepadatan sebesar 228 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Batu Brak sebesar 51 jiwa/Km<sup>2</sup>.

**Tabel 6. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Lampung Barat, Tahun 2014**

NO	KECAMATAN	PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Balik Bukit	19.256	17.824	37.080
2	Sukau	10.918	9.923	20.841
3	Lumbok Seminung	3.744	2.957	6.701
4	Belalau	6,588	5.724	12.312
5	Sekincau	9.594	8.528	18.122
6	Suoh	9.756	8.249	18.005
7	Batu Brak	6.780	6.162	12.942
8	Pagar Dewa	11.156	8.644	19.800
9	Batu Ketulis	8.165	6.498	14.663
10	Bandar Negeri Suoh	14.107	11.866	26.573
11	Sumber Jaya	12.110	11.330	23.440
12	Way Tenong	16.840	15.904	32.744
13	Gedung Surian	7.863	7.191	15.054
14	Kebun Tebu	10.605	9.628	20.233
15	Air Hitam	6.332	5.546	18.878

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat, jumlah penduduk pada tahun 2017 adalah sebanyak 298.286 jiwa yang terbagi dalam jumlah penduduk laki-laki sebesar 158.381 jiwa dan jumlah penduduk perempuan adalah sebesar 139.905 jiwa. Jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Balik Bukit sebesar 39.186 jiwa dan Kecamatan Lumbok Seminung dengan jumlah penduduk terkecil sebesar 6.601 jiwa.

## **4.2. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat**

### **4.2.1. Wilayah Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat terletak di Lingkungan Kompleks Pemerintah Daerah tepatnya di antara sebelah Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor Disdukcapil yang Beralamat di jalan Tulip No.2 Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Lampung, Kode Pos 34881.

### **4.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat**

Suatu organisasi harus mempunyai Tugas dan Fungsi agar roda organisasi dapat berjalan dengan baik, Oleh karena itu agar program dan kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan alurnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas pokok yaitu “Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Kebersihan, Pertamanan, Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah”.

Dalam rangka menjalankan roda organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun kebijakan teknis di bidang Kebersihan, Pertamanan, Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kebersihan, Pertamanan, Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.
- 3) Pemantuan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis di bidang Kebersihan, Pertamanan, Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.

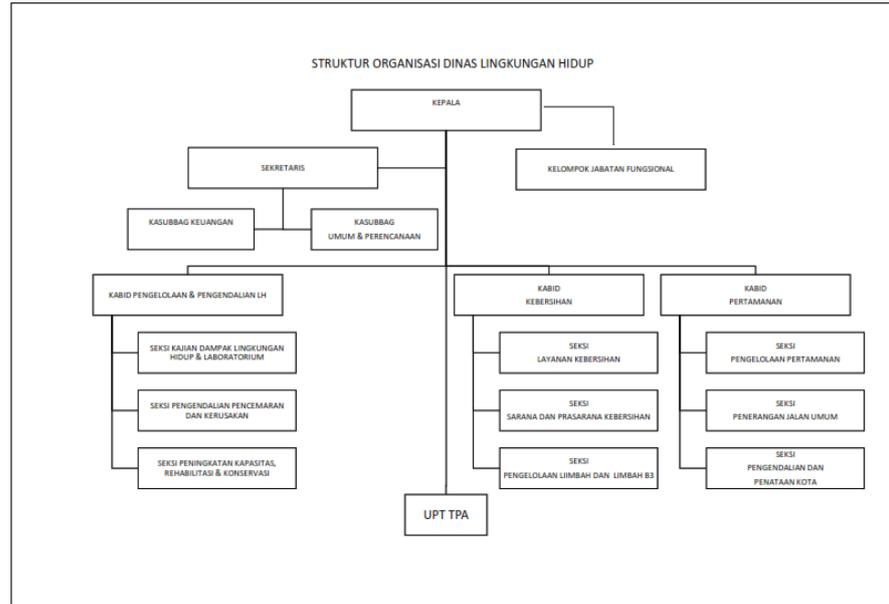
- 4) Pelaksanaan fungsi yang lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4.2.3. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat itu sendiri merupakan unsur penunjang pemerintahan dibidang kebersihan, pertamanan, pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup. Dinas dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat melaksanakan dalam bidang kebersihan, pertamanan, pengelolaan, dan pengendalian lingkungan hidup dengan sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Tutupan Lahan (IKTL), beserta Kebijakan Strategi Daerah (JAKSTARDA) untuk mendukung program Adipura dan Kabupaten Konservasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Untuk lebih jelasnya bagian struktur organisasi Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Lampung Barat sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat.



*Sumber : Arsip Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat 2023*

**Gambar 4. Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Kabupaten Lampung Barat**

## VI. PENUTUP

### 6.1. Simpulan

Setelah menganalisis dari hasil pembahasan yang diteliti terkait dengan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat peneliti dapat menyimpulkan bahwa Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dalam pengelolaan sampah belum maksimal dalam beberapa aspek yang terdapat dalam indikator. Indikator yang menjadi tolak ukur dalam penilaian tersebut yaitu indikator produktivitas, kualitas layanan, responsifitas, dan akuntabilitas. maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

#### 1. Produktivitas

Produktivitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Lampung Barat dalam hal efektivitas belum dikatakan maksimal, karena target capaian pengurangan sampah belum mampu terpenuhi sesuai dengan ketentuan Jakstrada, masih minim kegiatan yang dijalankan. Hal ini dikarenakan kapasitas bidang yang menangani persampahan sangat kecil dan juga terbatasnya anggaran dana serta saran prasarana selain itu juga SDM yang terbatas.

#### 2. Kualitas Layanan

Layanan yang diberikan kepada masyarakat belum secara merata, layanan hanya berfokus pada pusat kota sedangkan kecamatan yang berada di pinggiran kota belum di perhatikan secara maksimal.

#### 3. Reponsivitas

Responsivitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat terhadap keluhan masyarakat belum ditanggapi secara baik dan cepat. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dapat mengenali kebutuhan dan keinginan masyarakat tetapi belum ada upaya nyata untuk merespon dan mengatasi permasalahan sampah dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan aspirasi masyarakat terkait masalah sampah.

#### 4. Responsibilitas

Responsibilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dalam pengelolaan sampah masih sangat buruk, dilihat dari tingkat kesesuaian pegawai dalam pelaksanaan tugas persampahan yang dilakukan belum sesuai standar aturan yang berlaku.

#### 5. Akuntabilitas

Akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dalam pengelolaan sampah sudah dijalankan dengan baik, dilihat dari peranggungjawaban yang dilaksanakan yaitu Setiap tahun Dinas lingkungan hidup melaporkan seluruh rangkaian pekerjaan pada akhir tahun dengan menyusun Laporan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Jakstrada), tetapi untuk media bagi masyarakat melalukan pengaduan dan Pemberdayaan masyarakat belum dilaksanan oleh dinas lingkungan hidup.

### 6.2. Saran

Dari hasil penelitian yang Peneliti lakukan, berikut saran yang Peneliti berikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupen Lampung Barat :

1. Penyelenggaraan pengangkutan sampah seharusnya berjalan baik dan didukung sarana dan prasarana yang memadai.

2. Jumlah armada saat ini seharusnya sesuai pada volume sampah yang dihasilkan masyarakat, karena ketidak seimbangan itu membuat armada yang ada dipaksakan untuk menanggung beban dibatas kapasitasnya.
3. Jumlah Tempat Pembuangan Sampah saat ini sudah over-capacity, perlu adanya penambahan unit TPS yang tersebar di Kabupaten Lampung Barat dan pembuangan akhir sampah di Kabupaten Lampung Barat jangan hanya bergantung dengan kapasitas TPA Bahway, harusnya sudah ada perencanaan terhadap penambahan unit TPA yang dapat meringankan beban TPA Bahway.
4. Dinas Lingkungan Hidup agar melaksanakan kegiatan pemberdayaan dengan sosialisasi dan pembinaan masyarakat, agar supaya meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
5. Masyarakat diharapkan lebih loyal kepada pemerintah, karena pemerintah sudah bekerja dengan kemampuan yang dimiliki. Masyarakat pun perlu ikut serta membantu pemerintah untuk mengatasi permasalahan sampah, seharusnya masyarakat sudah memiliki kesadaran lingkungan karena sudah banyak akibat yang muncul dari masalah lingkungan.
6. Membangun kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah khususnya dalam hal promosi dan pembiayaan. Serta mempererat koordinasi dinas terkait dengan kecamatan dan pemerintah pekon/desa agar dapat membantu pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Barat menjadi lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku

- Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Aminudin. 2013. *Membentuk Pribadi Sadar Lingkungan Hidup*. Bandung: CV Angkasa
- Anis, F. (2014). kandung Sapto Nugroho. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*.
- Basriyanto.2007. *Memanen Sampah*. Yogyakarta: Kanisius
- Kastaman, Roni. 2007. *Sistem Pengelolaan Rektor Sampah Terpadu Silarsatu*. Bandung: Humaniora
- Osborne, D., & Plastrik, P. (1997). *Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Reinventing Government*. Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1 Jacob Way, Reading, MA 01867.
- Keban, Y. T. (2004). *Enam dimensi strategis administrasi publik: konsep, teori dan isu*. Gava Media.
- Moloeng, J. Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung
- Prof. Dr. H Imam Supardi, dr.Sp.Mk. 2003, *Lingkungan Hidup dan Kelestarian*. Bandung : PT. Alumni
- Sabartiyah. 2008. *Pelestarian Lingkungan Hidup*. Jakarta : CV. Pamularsih
- Sejati, Kuncoro. 2009. *Pengelolaan Sampah Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius
- Slamet J.S. 2009. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada. University Press

- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. UGM Press: Yogyakarta.
- Tangkilisan, H. N. S. (2005). *Manajemen publik*. Grasindo.
- Rabin, J. (Ed.). (2003). *Encyclopedia of public administration and public policy: AJ* (Vol. 1). CRC Press.
- Ikbar, Yanuar, 2012, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: Refika Aditama
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian* (cetakan ketujuh). Bogor : Ghalia Indonesia
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung
- Slamet J.S. 2009. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Soerjono Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Pers
- Soekanto, S 1984. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah – Masalah Sosial*. Bandung : Alumni
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta

## 2. Jurnal Ilmiah

- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149-163.
- Keban, Y. T. (2004). Pokok-pokok pikiran perbaikan sistem manajemen SDM PNS di Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 8(2), 15-33.
- Wahyuni, S., Tampi, G. B., & Mambo, R. (2017). Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(49).

- Suwerda, B., Hardoyo, S. R., & Kurniawan, A. (2019). Pengelolaan bank sampah berkelanjutan di wilayah perdesaan Kabupaten Bantul. *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan*, 11(1), 74-86.
- Mulyadi, E. (2015). Penerapan Model Project Based Learning untuk Meningkatkan Kinerja dan Prestasi Belajar Fisika Siswa SMK. *Jurnal pendidikan teknologi dan kejuruan*, 22(4), 385-395.
- Hermawan, A. (2016). Kinerja Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informasi Dan Informasi Kabupaten Banjar. *AL-ULUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2)..
- Aira, A. Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2013. *Jurnal El-Riyasah*, 5(2), 21-30.
- Ronaldo, R., Yuhana, K., & Suparman, A. (2020). Kinerja Pegawai Penyaluran Kredit Pensiunan Pada Bank Saudara Kantor Cabang Pembantu Subang. *The World of Business Administration Journal*.
- Kitong, P. *Kinerja Badan Pertanahan Nasional dalam Pelayanan Administrasi Sertifikasi Tanah* (Suatu studi pada kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera).
- Sakti, N. H. (2022). *Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Harun, H. (2017). Gambaran Pengetahuan Dan Perilaku Masyarakat Dalam Proses Pemilahan Sampah Rumah Tangga Di Rw 06 Desa Hegarmanah. *Dharmakarya*, 6(2).

### 3. Dokumen

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2007 *Tentang Pembagian Urusan Pemerintah*

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008  *tentang Pengelolaan Sampah*

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan*

Undang – Undang Nomor 23 Nomor Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah*

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2016 *Tentang Perangkat Daerah*

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 *tentang Pengelolaan Sampah*

Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 *Tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengeloaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga*

Arsip Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung barat *Tentang Sampah*